

SENATOR



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : 1-15 JANUARI 2024

■ Nusantara

**Senator Hilmy Muhammad:
Masih Ada yang Kurang
Paham dengan Yogyakarta?**

■ Wawancara

**AA Lanyalla Mahmud Mattalitti:
DPD RI Bertekad Kembalikan
Kedaulatan ke Tangan Rakyat!**

■ Sekretariat Jenderal

Banjir Penghargaan di Akhir 2023



Buka Posko Pengaduan di Seluruh Provinsi:

DPD RI SERIUS AWASI PELANGGARAN PEMILU

**DPD RI Dukung Kemerdekaan Penuh
Negara Palestina**

SCAN
ME!

Akses
MAJALAH SENATOR
Versi Digital



Dari Daerah Untuk Indonesia

ISSN 2978 - 3118

ISSN 2987-3118



9

772987

311004



SENAT UTAMA

4



- Buka Posko Pengaduan di Seluruh Provinsi: DPD RI Serius Awasi Pelanggaran Pemilu
- Pemilu 2024 Harus Lahirkan Pemimpin *Legitimate*
- Pemilu 2024 Sarat Masalah!
- Pejabat Negara Dilarang Terlibat Dukung Capres
- Debat Capres Tak Berbobot
- Debat Capres Tak Sentuh Pola Kaderisasi Parpol

WAWANCARA

11

- WAWANCARA EKSKLUSIF AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI: DPD RI Bertekad Kembalikan Kedaulatan ke Tangan Rakyat!

NUSANTARA

14

- Ketua DPD RI Intip Persiapan Haji 2024 di Arab Saudi
- Senator Hilmy Muhammad: Masih Ada yang Kurang Paham dengan Yogyakarta?
- Dewan Nasional Namibia “Belajar” ke DPD RI
- Pengurusan PGB dan SLF Berpotensi Jadi Ladang Korupsi
- Sumatera Diminta Terima Etnis Rohingya

GALERI

16



VARIA SENAT

20

- DPD RI Dukung Kemerdekaan Penuh Negara Palestina
- DPD RI Bakal Revisi UU Kepariwisata
- Revisi UU Perkoperasian DPD RI: Koperasi Harus Libatkan Pemda

SUARA DAERAH

24

- Pengrajin Tahu di Limbah yang Buntu

SEKRETARIAT JENDERAL

25



- Banjir Penghargaan di Akhir 2023
- DPD RI Tandatangani Perjanjian Kinerja 2024

KAJIAN DAERAH

29

- Isu Krusial Masa Depan Pertanian Indonesia

KULINER

31

- Empat Kuliner Paling Digemari dari Sumatera Selatan





SENATOR

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

PENASEHAT

Rahman Hadi
Lalu Niqman Zahir
Oni Choiruddin

PENGARAH

Mahyu Darma

PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB

Heru Firdan

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Fitra Helmi

REDAKTUR FOTO & GRAFIS

Agus Wiharto

EDITOR

Mas Aryo Kristiyanto,
Arso P Nugroho

DESAIN GRAFIS

Dimas Yulian Susanto

FOTOGRAFER

Haryo C.Wicaksono,
Eko Sudjarwo,
Undang Gunawan,
Prabandaru Ega Baskoro.

SEKRETARIAT

Theresia Oktavina, Betria Eriani,
Lela Sadiyah, Didin Saputra,
Hestiana Kiftia Sari,
Muhamad Fathoni,
Fandi Tri Prayogo,
Nanda Russia Rola

PENULIS ARTIKEL

Tim Pemberitaan

KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1
Gedung B DPD RI, Jl.Jend.Gatot Subroto No.6
Jakarta Pusat 10270

Email : keranjangsenator@gmail.com

Kotak Saran : majalah_senator@dpd.go.id

// website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri //

FB: www.facebook.com/DPDRI // twitter @dpdri

Pemilu dan Pengawasan oleh DPD RI

Pemilihan Umum Indonesia yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang, merupakan titik penting dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Pemilu 2024 tidak hanya akan menentukan komposisi anggota DPR, DPD RI, dan DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, tetapi juga akan memilih presiden dan wakil presiden yang akan memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan. Pentingnya pemilu ini tidak bisa dilebih-lebihkan, mengingat perannya dalam menentukan arah dan masa depan bangsa.

Sejak tahapan pemilu dimulai pada tahun 2023, berbagai dugaan penyimpangan telah muncul. Penyimpangan-penyimpangan ini menimbulkan kekhawatiran dan menuntut respons yang serius. Menanggapi hal ini, DPD RI telah mengambil langkah proaktif dengan mendirikan pusat pengaduan di setiap provinsi. Tujuan dari pusat-pusat pengaduan ini adalah untuk memantau dan mengatasi potensi pelanggaran pemilu, sesuai dengan tanggung jawab DPD RI dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017. Inisiatif ini mencerminkan komitmen DPD RI untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, adil, bebas dari politik uang, dan sesuai dengan hukum.

Pentingnya peran DPD RI dalam pemilu ini tidak hanya terbatas pada pengawasan saja. Hasil pemilu akan menentukan arah dan kebijakan Indonesia untuk lima tahun ke depan, sehingga meningkatkan bobot tanggung jawab yang diemban oleh DPD RI. Keterlibatan DPD RI dalam setiap aspek pemilu menunjukkan keseriusan mereka dalam memastikan integritas dan legitimasi proses demokrasi di Indonesia.

Efektivitas DPD RI dalam mengawasi pelaksanaan pemilu adalah faktor kunci dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan menjamin proses pemilu yang adil dan transparan. Keterlibatan aktif para anggota DPD RI dan pembentukan pusat pengaduan merupakan langkah strategis dalam mencapai tujuan ini. Namun, kunci utama efektivitas mereka terletak pada bagaimana langkah-langkah ini diterapkan dalam praktik dan seberapa efektif mereka dalam menangani laporan pelanggaran yang masuk.

Ujian sesungguhnya dari efektivitas DPD RI akan terlihat melalui dampak nyata dari tindakan pengawasan mereka terhadap pelaksanaan pemilu. Efektivitas ini tidak hanya diukur dari seberapa banyak pelanggaran yang terdeteksi, tetapi juga dari seberapa cepat dan tepat respon yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut. Keberhasilan DPD RI dalam hal ini akan menjadi tolak ukur penting dalam menilai kualitas demokrasi di Indonesia.

DPD RI, dengan peran kritisnya, tidak hanya berperan dalam pemilu yang akan datang, tetapi juga dalam menetapkan standar untuk proses demokrasi di masa depan. Melalui pengawasan yang ketat dan transparan, DPD RI berkontribusi dalam membentuk fondasi yang kuat untuk demokrasi yang sehat dan berkelanjutan negeri ini. Peran mereka dalam menjaga integritas pemilu adalah aspek fundamental yang akan menentukan arah demokrasi Indonesia di masa yang akan datang. (*) **Pemred**



Indonesia kini berada di ambang pelaksanaan Pemilu 2024, sebuah perhelatan demokrasi penting yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024. Pemilu ini tidak hanya krusial untuk memilih anggota legislatif dan presiden yang akan memimpin untuk lima tahun mendatang, tetapi juga menjadi titik tolak bagi masa depan bangsa. Saat ini, negara ini memasuki fase kampanye yang intens, melibatkan calon anggota legislatif serta pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan memainkan peran kritis dalam pemilu ini dengan membuka posko pengaduan dugaan pelanggaran pemilu di setiap provinsi di Indonesia. Sebab, DPD RI bertugas mengawasi pelaksanaan berbagai undang-undang, termasuk UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur pemilu. DPD RI berkomitmen untuk memastikan Pemilu 2024 berlangsung secara

**BUKA POSKO PENGADUAN
DI SELURUH PROVINSI:**

**DPD RI
SERIUS AWASI
PELANGGARAN
PEMILU**

Pimpinan DPD RI saat memimpin Sidang Paripurna ke-7 awal Januari 2024. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

demokratis, jujur, adil, bebas dari politik uang, dan sah sesuai aturan hukum. Hasil pemilu ini akan menentukan arah bangsa Indonesia untuk lima tahun ke depan, menjadikan tanggung jawab DPD RI semakin berat dan penting.

Dalam upaya menjaga integritas pemilu, DPD RI akan mengawasi setiap tahapannya, termasuk Pilkada Serentak 2024. Dengan membuka Posko Pengaduan Dugaan Pelanggaran Pemilu di setiap provinsi, DPD RI mengundang partisipasi masyarakat untuk





melaporkan potensi pelanggaran. Keputusan ini diresmikan dalam sidang paripurna DPD RI, menegaskan komitmen lembaga ini dalam menjaga transparansi dan keadilan pemilu.

Awal Januari 2024, dalam Rapat Pimpinan DPD RI dan Rapat Pleno Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI Mahyudin didampingi Ketua

DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, diputuskan bahwa semua anggota DPD RI akan diprioritaskan untuk mengawasi pemilu di daerah pemilihan masing-masing. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya komite terkait, tetapi seluruh anggota DPD RI turut serta dalam mengamankan proses demokrasi ini.

“DPD RI sebagai lembaga yang lahir dari pemilu

memiliki tanggung jawab mendalam untuk membawa bangsa ini menuju kepemimpinan yang lebih baik. Ini sejalan dengan mandat konstitusional kami untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, khususnya dalam pemilu,” tegas Mahyudin. Hal ini menekankan pentingnya peran DPD RI dalam mengawal masa depan demokrasi Indonesia. (*)

Pemilu 2024 Harus Lahirkan Pemimpin *Legitimate*

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menekankan pentingnya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berlangsung secara demokratis dan bebas dari politik uang. Dalam pertemuannya dengan anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta pada awal Januari 2024, LaNyalla menegaskan bahwa keberhasilan pemilu dalam menciptakan pemimpin yang *legitimate* menjadi kunci utama.

“Kami di DPD RI memiliki tanggung jawab untuk mengawasi setiap fase Pemilu Serentak 2024. Sebagai lembaga yang merepresentasikan daerah, sangat krusial bagi kami untuk memastikan bahwa pemilu berjalan adil, tanpa intervensi uang, dan menghasilkan pemimpin yang sah dan mampu membuat kepu-

tusan independen demi kebaikan rakyat,” ujar LaNyalla.

Untuk mengamankan proses pemilu, DPD RI telah membentuk posko pengaduan dugaan pelanggaran pemilu di setiap kantor DPD RI di ibu kota provinsi. Langkah ini diambil sesuai keputusan Sidang Paripurna DPD RI Ke-7. “Saya mengimbau seluruh anggota DPD RI untuk segera mengimplementasikan keputusan ini dan berkoordinasi dengan kantor daerah masing-masing,” tambahnya.

Selain membahas Pemilu 2024, LaNyalla juga menyoroti perjuangan DPD RI dalam mengembalikan Indonesia ke sistem pemerintahan asli yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Ini termasuk inisiatif untuk mengembalikannya dan memperbaiki UUD 1945 melalui teknik *adendum*. “Inisiatif ini adalah refleksi dari keinginan rakyat,

yang menghendaki kembalinya Indonesia ke sistem pemerintahan asli sesuai visi para pendiri bangsa,” tegas LaNyalla.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan anggota DPD RI dari berbagai daerah, seperti Sylviana Murni dan Dailami Firdaus (DKI Jakarta), Habib Ali Alwi, Abdi Sumaithi dan Ali Ridho Azhari (Banten), Muhammad Afnan Hadikusumo, Hilmy Muhammad dan Hafidh Asrom (DIY), Bambang Sutrisno (Jateng), Amang Safrudin, Asep Hidayat dan Eni Sumarni (Jabar), Abdul Hakim (Lampung), Adilla Azis (Jatim), serta Jihan Nurlela (Lampung). Pertemuan ini menandai sebuah momen penting di mana DPD RI bersatu dalam upaya memastikan integritas dan keaslian proses demokrasi Indonesia, sekaligus memperjuangkan aspirasi rakyat dalam sistem pemerintahan. (*)



PEMILU 2024 SARAT MASALAH!

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie menyampaikan pandangan kritis tentang kompleksitas yang akan dihadapi dalam Pemilu 2024. Menurutnya, pemilu serentak ini membawa tantangan yang lebih besar dibandingkan pemilu sebelumnya, terutama karena tidak adanya calon *incumbent*.

Jimly menekankan, situasi ini akan mengakibatkan pergantian kepemimpinan yang komprehensif di seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari eksekutif hingga legislatif di seluruh Indonesia, termasuk dalam Pilkada. Selain itu, guru besar tata negara ini menyoroti bahaya yang semakin nyata dari disrupsi teknologi, yang dapat mempengaruhi jalannya pemilu.

Menghadapi tantangan ini, Jimly memperingatkan semua lembaga penyelenggara pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK, untuk mempertahankan profesionalisme dan netralitas yang tak tergoyahkan. "Netralitas bukan hanya sebuah deklarasi, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan yang tidak menimbulkan kecurigaan," kata Jimly, dikutip dari Kompas TV dalam program Sapa

Indonesia Pagi, awal Januari 2024.

Jimly juga mengimbau para peserta pemilu, baik di tingkat legislatif maupun presiden, untuk menjauhi taktik saling serang dan fokus pada kampanye yang konstruktif. Beliau mengancam praktik *black campaign* dan negatif *campaign*, menyerukan pentingnya mempromosikan kepositifan dan keunggulan kandidat. Di era media sosial yang serba cepat ini, Jimly menyoroti bagaimana isu lama dapat kembali mencuat dan dimanipulasi, menambah kompleksitas dalam berpolitik.

Dengan pandangan ini, Jimly Asshiddiqie memberikan penekanan pada pentingnya integritas, transparansi, dan kesopanan dalam berpolitik, terutama menjelang Pemilu 2024 yang diprediksi akan menjadi salah satu pemilu paling kompleks dan kritis dalam sejarah Indonesia. (*)

Jimly Asshiddiqie (Foto Ist)



PEJABAT NEGARA DILARANG Terlibat Dukung Capres

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, secara tegas membantah bahwa dirinya mendukung calon presiden (capres) tertentu. Beliau menegaskan bahwa sebagai pejabat negara, kecuali anggota DPR RI, terdapat larangan untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Pernyataan ini disampaikan LaNyalla dalam keterangan resminya pada Desember 2023.

LaNyalla menyebut dua alasan utama yang mendasari sikapnya. *Pertama*, UU Pemilu yang melarang keterlibatan pejabat negara (selain anggota DPR) dalam kemenangan calon presiden. *Kedua*, karena dirinya sedang berupaya memperjuangkan kembalinya sistem pemilihan presiden ke asas dan sistem Pancasila melalui MPR, sebagai lembaga tertinggi negara.

Menurut LaNyalla, pilpres langsung masih menghasilkan polarisasi di tengah masyarakat, ditandai dengan aksi saling hujat dan caci maki antar pendukung pasangan calon. Hal ini terlihat jelas di media sosial dan di beberapa ranah publik. Ia berpendapat bahwa sebagai bangsa yang majemuk, dengan karakter asli yang guyub dan komunal, Indonesia tidak seharusnya dipaksa menjadi bangsa yang individualistis dan pragmatis.

“Kita memiliki sistem asli, yaitu pemilihan mandataris MPR melalui wakil rakyat yang utuh. Seharusnya, yang bermusyawarah adalah para hikmat. Namun, karena praktik penyimpangan di era Orde Baru, kita meninggalkan sistem yang dirumuskan oleh pendiri bangsa dan mengadopsi sistem

“

Saya secara pribadi mengenal semua pasangan calon. Saya konsisten menawarkan gagasan kepada bangsa ini, termasuk kepada para paslon peserta Pilpres 2024, untuk kembali ke jati diri dan sistem asli bangsa ini, yaitu Pancasila, dengan menggunakan MPR sebagai penjelmaan rakyat yang utuh dalam memilih presiden. Pilpres langsung tidak cocok untuk Indonesia.

”

LaNyalla Mahmud
Mattalitti

Barat yang individualistis dan liberal. Akibatnya, kita menjadi bangsa yang tercerabut dari akarnya,” papar LaNyalla.

LaNyalla menekankan bahwa pada saat reformasi, seharusnya yang diperbaiki adalah penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru, bukan mengganti sistem bernegara dengan sistem liberal. Beliau berpendapat bahwa pilpres langsung dapat merusak kohesi bangsa yang telah dirajut selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan, beliau selalu menyampaikan bahwa polarisasi bangsa akibat pilpres langsung harus segera diakhiri, karena hal ini sangat tidak produktif dan menurunkan kualitas bangsa sebagai masyarakat yang beradab dan beretika. (*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Debat Capres TAK BERBOBOT

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris, menilai bahwa debat calon presiden (capres) dalam Pilpres 2024 kurang berbobot dan kurang menarik. Menurutnya, perdebatan antara calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres) tidak cukup mendalam. Fahira menyebutkan bahwa penyebab utamanya adalah banyaknya tema yang dibahas dalam satu sesi debat, mirip dengan format debat pilpres sebelumnya.

Senator dari DKI Jakarta ini memberi contoh debat perdana antarcapres, di mana ketiga capres harus beradu gagasan untuk tujuh tema utama, yaitu pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga, dalam waktu kurang dari 120 menit.

Dia mengakui bahwa tema-tema tersebut saling terkait, tetapi karena keterbatasan waktu, capres dan cawapres sering terjebak dalam narasi yang tidak konkret. Oleh karena itu, dia mengharapkan para capres dapat menyampaikan gagasan yang lebih konkret,

menyentuh langsung ke inti persoalan dan relevan dengan isu-isu kekinian.

Fahira meyakini bahwa jika Debat Pilpres 2024 diselenggarakan dengan substansi dan teknis yang menarik, dampaknya akan signifikan dalam meningkatkan kualitas Pemilu 2024. “Ini akan menguntungkan bagi penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena Debat Pilpres adalah sarana sosialisasi yang masif, efektif, dan efisien untuk meningkatkan partisipasi pemilih,” ujar Fahira pada pertengahan Desember tahun lalu.

Meskipun ada keraguan tentang Debat Pilpres 2024, Fahira percaya bahwa debat tersebut akan tetap menarik, baik dari sisi substansi maupun teknis. Selain itu, debat ini juga berpotensi memberikan dampak positif bagi semua pasangan calon (paslon), khususnya dalam meningkatkan elektabilitas mereka.

Fahira berpendapat bahwa paslon yang mampu memanfaatkan panggung debat untuk menyampaikan gagasan mereka dan menanggapi kekhawatiran publik dengan solusi yang tepat, berpotensi mendapatkan dukungan suara, terutama dari pemilih yang belum menentukan pilihan mereka.

Bagi pemilih di Indonesia, rangkaian debat Pilpres 2024 menjadi referensi utama untuk menilai paslon mana yang benar-benar memahami persoalan bangsa dan kehidupan sehari-hari rakyat. “Debat Pilpres 2024 adalah kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mempertimbangkan pilihan mereka sebelum menuju tempat pemungutan suara (TPS),” tutur Fahira.” (*)



Fahira Idris. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

DEBAT CAPRES TAK SENTUH POLA KADERISASI PARPOL

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, memberikan komentarnya terkait proses rangkaian debat calon presiden (capres) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia menyoroti bahwa masyarakat belum mendapatkan gambaran yang jelas mengenai topik demokrasi, khususnya peran dan fungsi partai politik.

Sultan mengapresiasi panelis Debat Pilpres 2024 yang telah cukup baik mengeksplorasi realitas demokrasi dan politik nasional secara umum. Namun, Sultan mencatat bahwa para panelis belum menggali secara detail dan kritis tentang jabatan ketua umum partai politik (porpol) yang saat ini tidak dibatasi oleh undang-undang partai politik.

“Perlu ada pembaharuan pada kelembagaan partai politik agar mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam pembangunan demokrasi Indonesia. Saat ini, pola kaderisasi partai politik cenderung kurang

demokratis,” ujar Sultan pada Desember lalu.

Sultan secara tegas menyampaikan bahwa ini terlihat dari jabatan ketua umum partai politik yang tampaknya berlaku seumur hidup, sementara partai politik memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mencetak calon pemimpin nasional.

“Kelembagaan partai lebih banyak diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, bukan undang-undang. Ini mengakibatkan ketidakmampuan mengontrol persoalan krusial seperti masa jabatan maksimal ketua umum partai,” lanjutnya.

Sultan menambahkan, partai politik seharusnya bukan organisasi dagang atau perusahaan keluarga yang dikuasai secara tirani oleh satu orang atau sekelompok orang. Sangat disayangkan bahwa isu partai politik, yang menghambat proses demokrasi dan keadilan politik, justru tidak dibahas dalam debat tersebut. (*)



Sultan B Najamudin.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Ketiga calon presiden (capres) Pilpres 2024 saat tampil pada debat capres putaran pertama pada 12 Desember 2023 lalu. (Foto: Instagram)

Jadwal dan Tema Debat Capres 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Debat capres dan cawapres Pilpres 2024 dilaksanakan sebanyak lima kali. Adapun lokasi debat capres dan cawapres 2024 akan berlangsung secara keseluruhan di Jakarta.

Debat Pilpres 2024 digelar dengan format tiga kali untuk capres dan dua kali untuk cawapres. Berikut jadwal lengkap dan tema debat capres dan cawapres dalam Pilpres 2024.

Debat pertama (Capres): 12 Desember 2023

Tema: Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga.

Debat kedua (Cawapres): 22 Desember 2023

Tema: Ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan

Debat ketiga (Capres): 7 Januari 2023

Tema: Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik

Debat keempat (Cawapres): 21 Januari 2023

Tema: Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa

Debat kelima (Capres): 4 Februari 2023

Tema: Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.

WAWANCARA EKSKLUSIF AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI:

DPD RI Bertekad Kembalikan Kedaulatan ke Tangan Rakyat!

Di tahun 2024 ini, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan merayakan dua dekade keberadaannya, sebuah perjalanan panjang selama 20 tahun dalam mewakili aspirasi daerah di kancah nasional. Selama hampir dua puluh tahun ini, DPD RI sering dianggap sebagai institusi yang 'antara ada dan tiada', terhimpit oleh keterbatasan kewenangan. Terbukti, hanya tiga undang-undang yang berhasil mereka lahirkan, sebuah prestasi yang mungkin terlihat kecil dalam konteks kamar kedua dalam sistem parlemen bikameral Indonesia. Meskipun DPD RI memiliki peran dalam pengawasan undang-undang yang berhubungan dengan kepentingan daerah, ironisnya, temuan pengawasannya tidak langsung disampaikan kepada eksekutif, melainkan harus melalui DPR RI.

Namun, siapa bisa mengatakan bahwa DPD RI tidak berbuat

apa-apa selama 19 tahun ini? Dibalik anggapan tersebut, DPD RI telah mengusulkan ratusan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR RI. Sesuai dengan Pasal 22D UUD 1945, kewenangan DPD RI dalam legislasi terbatas pada pengajuan RUU tertentu, partisipasi dalam diskusi bersama DPR RI dan Pemerintah terkait RUU tertentu, serta memberikan pandangan dan pendapat terhadap RUU tertentu, dan memberikan pertimbangan terhadap RUU tentang APBN serta RUU yang berkaitan dengan pajak, namun tidak memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

Di bawah kepemimpinan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dengan dukungan dari tiga wakilnya Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B. Najamudin, DPD RI telah berupaya keras untuk meningkatkan kewenangannya. Akan tetapi, berbagai upaya melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, termasuk rencana amendemen ke lima UUD 1945, selalu menemui jalan buntu.

Memasuki tahun kelima kepemimpinan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan dua dekade kehadiran DPD RI, kami berkesempatan mewawancarai beliau. Dalam wawancara ini, Ketua DPD RI membuka hati dan pikirannya, berbagi pandangan dan perjuangan yang telah dilakukannya di DPD RI selama empat tahun terakhir. Berikut petikannya.

Apa tantangan utama yang dihadapi DPD RI selama dua dekade ini, dan bagaimana institusi ini berhasil mengatasinya?



Dua dekade ini, DPD RI sering dianggap sebagai pelengkap DPR RI dengan keterbatasan kewenangan yang signifikan. Dalam menghadapi tantangan ini, solusi yang kami usulkan adalah kembali ke UUD 1945 naskah asli dengan adendum, sebagai langkah awal untuk memperbaiki sistem dari hulu hingga hilir. Kami di DPD RI bertekad kuat sebagai inisiator, didukung oleh seluruh elemen bangsa.

Dalam pandangan Anda, apa kontribusi terbesar DPD RI terhadap penguatan demokrasi dan desentralisasi di Indonesia?

DPD RI, meski dengan keterbatasan wewenang, telah berupaya maksimal dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Kami terus mencari terobosan untuk memperkuat peran kami sebagai wakil daerah. Kontribusi terbesar kami adalah inisiatif untuk membangun kesadaran kolektif dalam menerapkan sistem bernegara Pancasila, sesuai dengan visi para pendiri bangsa yang telah disempurnakan.

Apa strategi utama DPD RI dalam beberapa tahun mendatang untuk lebih meningkatkan perannya dalam sistem politik Indonesia?

Strategi utama kami di DPD RI adalah memperkuat peran dan fungsi lembaga melalui gagasan yang sesuai dengan amanat para pendiri bangsa. Kami terus berupaya keras, berpikir kritis, dan menciptakan terobosan untuk memaksimalkan peran kami sebagai wakil daerah, serta berperan aktif dalam perumusan kebijakan di tingkat daerah dan nasional.

Bagaimana DPD RI berencana untuk mengatasi tantangan baru yang muncul, baik di tingkat nasional maupun regional?

Kami di DPD RI berencana menghadapi tantangan baru dengan kembali kepada asas dan sistem bernegara Pancasila

yang dirancang oleh para pendiri bangsa. Kami membuka kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, membangun kemitraan dengan pemerintah, dan terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mencari solusi atas problematika kebangsaan.

Dalam konteks kerjasama regional dan internasional, apa langkah-langkah yang telah dan akan diambil DPD RI di bawah kepemimpinan Anda?

Di bawah kepemimpinan saya, DPD RI telah membangun kerjasama yang kuat dengan para pemangku kepentingan regional dan internasional. Kami telah berpartisipasi dalam berbagai inisiatif, seperti kerjasama maritim dengan Uni Eropa dan mendukung produk halal di pasar internasional. Kedepannya, kami akan lebih intensif dalam mendorong kerjasama strategis Indonesia di tingkat regional dan internasional.

Bagaimana Anda melihat dan merasakan kolaborasi antara DPD RI dengan DPR RI dalam mewujudkan kepentingan daerah? Apa saja bentuk kolaborasi yang dilakukan?

Kolaborasi antara DPD RI dan DPR RI telah berlangsung selama dua dekade, dengan dinamika yang bervariasi. Kami telah berkolaborasi dalam pembuatan legislasi, rapat bersama, dan dalam upaya memajukan daerah melalui kerjasama yang harmonis. Kami juga terus berupaya meningkatkan sinergi dan konsepsi bersama dalam mewujudkan kepentingan daerah.

Salah satu usulan RUU inisiatif DPD RI yang sudah cukup lama diperjuangkan adalah RUU Daerah Kepulauan. Apakah ada lobi-lobi khusus yang dilakukan oleh Pimpinan DPD RI dengan DPR RI?

Kami telah melakukan berbagai upaya lobi untuk memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan. Melalui berbagai forum seperti

‘Obrolan Senator’, pertemuan dengan gubernur, dan Musyawarah Nasional, kami telah menunjukkan keseriusan kami dalam mengawal RUU ini. Kami juga telah meminta dukungan dari gubernur seluruh Indonesia untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada DPR RI dan Pemerintah.

Bagaimana dampak kepemimpinan Anda pada DPD RI, khususnya dalam hal inisiatif kebijakan dan kerja sama antar-lembaga?

Kepemimpinan saya di DPD RI telah berfokus pada mekanisme *checks and balances*, memperkuat kelembagaan DPD RI, dan menyuarakan pentingnya kembali ke naskah asli UUD 1945. Kami berusaha memastikan bahwa keputusan politik penting, terutama yang berkaitan dengan daerah, dibahas secara komprehensif antara Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI.

Apa pencapaian utama selama empat tahun kepemimpinan Anda di DPD RI, dan bagaimana ini mempengaruhi visi institusional DPD?

Pencapaian utama saya adalah kontribusi maksimal kami dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Kami telah berkeliling ke 34 Provinsi, menawarkan gagasan untuk memperkuat sistem bernegara Indonesia. Inisiatif ini telah mempengaruhi visi institusional DPD RI, mengembalikan kedaulatan rakyat, dan mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Selama empat tahun ini, aspek apa saja yang berubah paling signifikan di DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah?

Selama empat tahun ini, perubahan signifikan di DPD RI terfokus pada reformasi wajah dan martabat ketatanegaraan Indonesia. Kami telah memfokuskan upaya kami untuk kembali ke UUD 1945 naskah asli pasca perubahan di tahun 2002, sebagai langkah

penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah.”

Secara pribadi, apa pelajaran terbesar yang Anda peroleh selama berada di DPD RI, dan bagaimana ini mempengaruhi gaya kepemimpinan Anda?

Pelajaran terbesar saya adalah bahwa Indonesia memerlukan pemulihan martabat dan sistem ketatanegaraan yang kuat. Saya telah menghibahkan diri saya untuk bangsa dan negara lewat DPD RI. Hal ini telah membentuk gaya kepemimpinan saya yang aktif, tegas, dan istiqomah dalam mengemban tugas.”

Anda termasuk pemimpin yang cukup getol memperjuangkan kesetaraan dan penguatan lembaga ini sejak awal jadi Ketua DPD RI, tapi dalam kenyataannya keinginan itu belum membuahkan hasil. Kenapa bisa begitu?

Perjuangan untuk menguatkan DPD RI seringkali menemui hambatan. Perubahan dari utusan daerah menjadi DPD RI tidak secara otomatis meningkatkan kewenangan kami. Kami perlu memulihkan fungsi kelembagaan dan demokrasi desentralistik, yang sangat penting untuk mensinkronkan kepentingan daerah dengan pusat. Ini memerlukan itikad baik dari semua penyelenggara negara.”

Bersama sejumlah elemen masyarakat, Anda menginisiasi pengembalian UUD 1945 ke naskah asli, untuk kemudian dilakukan adendum. Apakah Anda yakin dengan langkah tersebut?

Saya sangat yakin dengan langkah ini. Saya percaya bahwa pengembalian ke UUD 1945 naskah asli, disertai adendum, adalah kunci untuk memajukan daerah, bangsa, dan negara. Amendemen di masa lalu telah mengubah kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik. Langkah ini bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. (*)



Ketua DPD RI Intip Persiapan Haji 2024 di Arab Saudi

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, baru-baru ini melakukan kunjungan mendadak ke Arab Saudi untuk mengevaluasi persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Kunjungan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan terulangnya masalah yang dialami jemaah haji Indonesia pada tahun sebelumnya. LaNyalla, yang mengadakan kunjungan tanpa protokoler, ingin memastikan bahwa kesulitan yang dihadapi jemaah haji tidak terjadi lagi.

Selama kunjungan tersebut, LaNyalla mengunjungi berbagai lokasi krusial di Arafah dan Mina. Ia secara langsung meninjau pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor dan memeriksa persiapan tenda-tenda yang akan digunakan jemaah. Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk melihat secara langsung berbagai peningkatan kualitas yang dijanjikan oleh Pemerintah Arab Saudi.

LaNyalla memberikan apresiasi kepada Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Haji Arab Saudi atas komitmen mereka dalam meningkatkan layanan untuk jemaah haji. Menurutnya, perbaikan khususnya di lokasi Armina (Ara-



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat pertemuan dengan jajaran KJRI Jeddah dengan Kantor Urusan Haji di Jeddah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

fah, Muzdalifah, dan Mina) merupakan langkah signifikan. LaNyalla menyatakan bahwa peningkatan layanan ini akan memberikan dampak positif bagi jemaah haji, khususnya dari Indonesia.

Pelaksanaan ibadah haji tahun sebelumnya diwarnai oleh berbagai insiden, termasuk layanan yang kurang memadai bagi jemaah haji Indonesia. Mulai dari pendistribusian makanan yang lambat, pasokan air bersih yang terganggu, hingga masalah di tenda dan keterlambatan evakuasi. Menanggapi hal ini, Kerajaan Saudi berjanji untuk meningkatkan empat layanan dasar di Armina, meliputi penambahan toilet, penggunaan alas lantai pasir halus di wukuf, stabilisasi kelistrikan, dan lantai keramik di Mina.

Perubahan signifikan lainnya adalah penghapusan zona negara dan benua di lokasi Armina. Dengan sistem “*first come first serve*”, LaNyalla menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk segera mengidentifikasi dan menentukan lokasi strategis di Arafah dan Mina. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan jemaah Indonesia mendapatkan posisi yang optimal.

Setelah meninjau lokasi Armina, LaNyalla bertemu dengan Konjen RI Yusron B. Ambary di KJRI Jeddah dan pejabat Kantor Urusan Haji. Kunjungan yang dilakukan hanya bersama beberapa staf ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi pengalaman ibadah haji jemaah Indonesia pada tahun 2024. (*)

SENATOR HILMY MUHAMMAD:

Masih Ada yang Kurang Paham dengan Yogyakarta?

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hilmy Muhammad, menanggapi kritik yang dilontarkan Ade Armando terhadap sistem penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai tindakan yang tidak berdasar dan tidak memahami sejarah. Menurut Hilmy, penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY berlandaskan UU Keistimewaan, yang merupakan pengakuan pemerintah pusat atas peran historis Keraton Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.

Hilmy, yang akrab disapa Gus Hilmy, menilai Ade Armando --seorang akademisi dan pegiat media sosial-- kurang memahami konteks politik dinasti dan sistem monarki yang ada di Yogyakarta. Dia menegaskan bahwa kritik tersebut hanya mengikuti tren pembicaraan nasional tanpa memperhatikan fakta historis dan konstitusional yang ada.

Gus Hilmy menjelaskan bahwa UU Keistimewaan DIY Tahun 2012 secara spesifik menetapkan bahwa Gubernur DIY harus ber-

tahta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan Wakil Gubernur sebagai Adipati Paku Alam. “Ini merupakan bentuk pengakuan atas kontribusi signifikan kedua kerajaan tersebut dalam sejarah Indonesia, terutama dalam perjuangan kemerdekaan, di mana Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota negara,” katanya menanggapi Armando, Desember lalu.

Lebih lanjut, Gus Hilmy menguraikan pentingnya mengenali Yogyakarta tidak hanya sebagai kota pelajar, tetapi juga sebagai kota pergerakan dan revolusi, menggarisbawahi peran vitalnya dalam sejarah Indonesia. Status keistimewaan Yogyakarta, menurutnya, harus dilihat sebagai penghargaan atas peran unik dan penting daerah ini dalam sejarah negara.

Karena itu, Gus Hilmy meminta masyarakat untuk tidak terlalu reaktif terhadap kritik Ade Armando dan menciptakan suasana yang kondusif. Dia menekankan bahwa Ade Armando telah meminta maaf atas pernyataannya, sehingga lebih bijaksana untuk tidak menghabiskan energi pada masalah tersebut. (*)



Hilmy Muhammad.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



PENGURUSAN PGB DAN SLF Berpotensi Jadi Ladang Korupsi

Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dinilai berpotensi menjadi sumber korupsi, terutama melalui pola penyuapan dari pengusaha ke otoritas. Hal ini disebabkan oleh lamanya proses pengurusan PBG dan SLF yang merupakan dasar hukum untuk memulai konstruksi dan menyatakan bangunan aman digunakan, berlaku untuk semua jenis bangunan.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, pada Desember 2023, menyoroti lamanya waktu pengurusan PBG dan SLF yang seringkali membuat pelaku usaha harus menggunakan jasa konsultan dengan biaya mahal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah mengamati lamanya waktu dan variabilitas biaya konsultan dalam proses ini yang dikhawatirkan berpotensi menimbulkan penyuapan.

Salah satu penyebab utama keterlambatan pengurusan PBG dan SLF adalah keterlibatan Tim Profesi Ahli (TPA) yang jumlahnya terbatas di Indonesia, dengan beberapa provinsi bahkan tidak memiliki TPA karena organisasinya tidak ada. Bukan semua provinsi memiliki Perhimpunan Ahli Pengkaji Teknis Indonesia (PAPTI) yang eksis.

Menanggapi hal ini, LaNyalla mendesak Kementerian PUPR untuk memberi perhatian serius, agar tidak menghambat upaya peningkatan peringkat *Easy of Doing Business (EoDB)* Indonesia. "Diperlukan metode untuk mempercepat proses PBG dan SLF dengan biaya terjangkau, disesuaikan dengan iklim usaha pasca pandemi, serta sistem IT yang terintegrasi untuk kemudahan pelaku usaha tanpa harus membayar konsultan," tegas LaNyalla.

Ia meminta Kementerian PUPR untuk menetapkan keseragaman dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta keseragaman biaya, yang mungkin mengacu pada indeks ekonomi masing-masing kabupaten/kota. Menurutnya, peraturan yang menyulitkan dan memperlambat proses tidak hanya merugikan tetapi juga melemahkan skor kemudahan investasi di Indonesia, terutama bagi pelaku usaha yang masih berusaha bangkit pasca pandemi. (*)

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Sumatera Diminta Terima Etnis Rohingya

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menyerukan agar masyarakat Melayu, terutama di wilayah Sumatera, menerima kedatangan warga etnis Rohingya secara sukarela dan dengan perlakuan manusiawi. Sultan mengapresiasi respons positif masyarakat terhadap etnis Rohingya yang saat ini telah tiba di beberapa daerah di Indonesia. “Bangsa Indonesia sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang asal usul dan latar belakang budaya atau agama,” ucap Sultan dalam pernyataan tertulisnya di awal Januari 2024.

Eks Wakil Gubernur Bengkulu tersebut juga mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan barak pengungsian dan makanan yang layak bagi pengungsi Rohingya. Sultan menekankan pentingnya pemeriksaan identitas dan riwayat kesehatan para pengungsi untuk mencegah keresahan sosial di masyarakat lokal.

Berdasarkan data UNHCR, badan pengungsi PBB, lebih dari 1.500 warga Rohingya telah mendarat di Indonesia sejak November 2023. Sebanyak 147 pengungsi Rohingya mendarat di sebuah teluk tak berpenghuni di Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada akhir

Desember 2023 dalam kondisi yang memprihatinkan.

Sultan menyoroti kekerasan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar, yang dianggap sebagai pendatang asing dari Asia Selatan, mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomasi bersama negara-negara ASEAN terhadap junta militer Myanmar. Dia menegaskan bahwa kekerasan terhadap etnis Rohingya harus dihentikan dan Indonesia harus menjadi pelopor dalam menangani masalah ini.

Di sisi lain, anggota DPD RI Hilmy Muhammad menyayangkan penolakan pengungsi Rohingya di Gedung Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, pada akhir Desember 2023. Hilmy menekankan bahwa Indonesia memiliki mekanisme penanganan pengungsi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

“Negara harus bertindak sesuai peraturan yang berlaku untuk menghormati hak pengungsi dan menjaga nama baik Indonesia di mata dunia,” ujar Gus Hilmy.



Pengungsi Rohingya usai mendarat menggunakan kapal di Pantai Mercusuar, Desa Kuala Besar, Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang, Sumut, Minggu (31/12/2023). (Foto Istimewa)



Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam "Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi dengan tema "Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat", di Pendopo Bupati Banyuwangi, Desember 2023 lalu. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono bersama Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno saat menghadiri HUT ke-38 Senam Tera Indonesia (STI) di Jakarta, Desember 2023 lalu. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat tampil berbicara program konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup di Paviliun Indonesia pada COP28, Dubai, Desember 2023 lalu. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)





Dewan Nasional Namibia “Belajar” ke DPD RI

Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein didampingi sejumlah pejabat Setjen DPD RI ketika menerima Ketua Dewan Nasional Namibia Lukas Sinimbo Muha. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI menerima kunjungan benchmarking study Ketua Dewan Nasional Namibia, Lukas Sinimbo Muha, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pertengahan Desember lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari operasional lembaga legislatif di Indonesia, mencakup sistem administrasi, penganggaran, dan pelayanan kegiatan keahlian dalam menjalankan tugas-tugas wakil daerah.

Lukas Sinimbo Muha mengungkapkan bahwa Namibia menganut asas trias politika, di mana pemerintahan dibagi menjadi tiga kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk cabang legislatif, Namibia memiliki dua lembaga, yaitu Dewan Nasional dan Majelis Nasional. Sebagai negara yang merdeka pada tahun

1990, Namibia berkeinginan belajar dari negara lain tentang pelaksanaan persidangan, praktik kepemimpinan, dan hubungan antara staf politisi dengan staf administrasi.

Kunjungan ini juga bertujuan untuk mempelajari cara membangun hubungan dan kerja sama antara lembaga legislatif dan eksekutif. Hal ini penting karena rekomendasi dari lembaga legislatif Namibia terkadang tidak sepenuhnya diimplementasikan oleh lembaga eksekutif di negaranya.

Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein, menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, DPD RI didukung oleh sekretariat jenderal. Sekretariat jenderal ini, dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal profesional, bertugas memberikan dukungan administratif, operasional, keahlian,

dan pengelolaan kantor DPD RI di ibu kota provinsi. Darmansyah ditemani oleh beberapa pejabat Setjen DPD RI, seperti Deputy Administrasi Lalu Niqman Zahir, Deputy Persidangan Oni Choirudin, dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Sanherif S Hutagaol.

Senator dari Bangka Belitung ini juga membahas tentang implementasi strategi e-parlemen DPD RI. Strategi ini meliputi pemanfaatan teknologi, pengetahuan, dan standar dalam proses tata kelola parlemen, mendorong kolaborasi, inklusivitas, partisipasi, dan keterbukaan kepada masyarakat. E-parlemen DPD RI mencakup database keanggotaan, portal dan *dashboard* DPD RI, *mapping* kegiatan, informasi persidangan, dan *digital signage* untuk mempermudah akses informasi kinerja DPD RI kepada masyarakat. (*)

DPD RI DUKUNG KEMERDEKAAN PENUH Negara Palestina



Wakil Ketua DPD RI Nano Sampono didampingi rekan sejawatnya Sultan B Najamudin saat memimpin Sidang Paripurna Ke-6 Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pada tanggal 1 Desember 2023, suasana yang biasa terasa formal dan resmi di ruang rapat utama Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, berubah menjadi lebih bersemangat dan emosional. Di tempat ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI biasanya mengadakan sidang paripurna, namun suasana pada hari itu terasa unik dan berbeda.

Dalam Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun 2023-2024, agenda yang diusung adalah penutupan masa sidang, disertai dengan penyampaian laporan kinerja serta pengawasan atas pelaksanaan undang-undang

oleh masing-masing alat kelengkapan DPD RI. Namun, ada nuansa yang mencolok dan penuh makna pada sidang tersebut, kehadiran anggota DPD RI yang mengenakan syal Palestina, simbol solidaritas dan dukungan mereka terhadap kemerdekaan Palestina.

Ketika Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono yang didampingi rekannya Sultan B Najamudin, memimpin sidang, sebuah pernyataan resmi disampaikan. DPD RI dengan tegas menyatakan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Nono Sampono, dengan suara penuh tekad, menyatakan bahwa



Anggota DPD RI memakai syal Palestina saat menghadiri Sidang Paripurna Ke-6 Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

ini merupakan sikap resmi DPD RI dalam menyikapi situasi yang dialami oleh bangsa Palestina saat ini.

Nono Sampono juga menegaskan dukungan DPD RI terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ia mengemukakan keras agresi militer yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dan mendesak agar agresi tersebut segera dihentikan. “Kita harus berdiri teguh dalam memperjuangkan kemanusiaan, kemerdekaan Palestina, dan mengemukakan tindakan militer Israel

yang telah melanggar hukum humaniter internasional,” ucap mantan Komandan Korps Marinir tersebut dengan penuh semangat.

Permusuhan atau konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina ini bukanlah sesuatu yang baru. Konflik ini telah berlangsung lebih dari 100 tahun, dimulai sejak tahun 1917. Perang terbaru antara Hamas dan Israel yang meletus pada 7 Oktober 2023 adalah eskalasi terkini dari konflik berkepanjangan ini. Meskipun sempat ada gencatan senjata, agresi militer Israel terhadap Palestina masih berlanjut hingga saat ini, menelan ribuan korban jiwa dari warga Palestina. (*)



DPD RI Bakal Revisi UU Kepariwisata



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat memimpin Sidang Paripurna Ke-7 Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024, awal Januari 2024. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menunjukkan inisiatif proaktif dengan berencana merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Langkah ini diambil karena UU yang telah berusia 14 tahun ini dinilai tidak lagi sejalan dengan perkembangan dan dinamika terkini dalam sektor kepariwisataan, baik di Indonesia maupun secara global.

Kepentingan revisi ini ditekankan mengingat peranan signifikan kepariwisataan dalam perekonomian nasional dan pada tingkat daerah, khususnya dalam mendukung ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam

hal regulasi, pendanaan, kelemagaan, penggunaan teknologi, sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat,” ujar Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, dalam Sidang Paripurna Ke-7 Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 yang diadakan di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, pada awal Januari 2024.

Senator dari Kalimantan Timur ini juga menekankan perlunya segera menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009. Dalam proses penyusunan RUU tersebut, Mahyudin menyarankan keterlibatan berbagai *stakeholder* di bidang kepariwisataan untuk memastikan bahwa revisi UU dapat mencerminkan kebutuhan

dan tantangan sektor tersebut secara menyeluruh.

Salah satu fokus utama dalam revisi ini adalah pembentukan pengaturan dan mekanisme yang lebih efektif untuk mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah. Ini termasuk dukungan anggaran yang lebih baik dan kemudahan investasi.

Mahyudin menyoroti perlunya dana bagi hasil atau peningkatan dana transfer daerah (TKD) yang dapat meminimalisir hambatan administratif dan berfokus pada pengembangan pariwisata jangka panjang. Inisiatif ini diharapkan dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi kepariwisataan di Indonesia, terutama dalam memajukan ekonomi daerah dan memperkuat sektor UMKM. (*)

Revisi UU Perkoperasian

DPD RI: Koperasi Harus Libatkan Pemda

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah menyampaikan pandangan dan pendapat yang kritis terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pandangan ini, yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Fernando Sinaga, dalam Sidang Paripurna ke-6 DPD RI Masa Sidang II tahun 2023-2024 pada Desember 2023, kemudian ditetapkan sebagai pendapat resmi DPD RI.

Salah satu keberatan utama DPD RI terhadap RUU ini adalah bahwa ia belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan rakyat Indonesia dan belum sepenuhnya mencerminkan asas gotong-royong yang fundamental dalam koperasi. DPD RI menyoroti bahwa peran pemerintah dalam RUU ini terbatas pada pemerintah pusat, dengan tanggung jawab yang terfokus pada penyediaan sarana dan prasarana, pembuatan mekanisme, serta fasilitasi penyelesaian pengaduan. Menurut DPD RI, pemerintah daerah juga harus dilibatkan secara aktif dalam proses ini.

“Untuk memastikan keberpihakan koperasi terhadap kepentingan ekonomi kerakyatan, segala sesuatu yang berkaitan dengan koperasi harus melibatkan pemerintah daerah, termasuk dalam pembinaan, pendampingan,

pengawasan, dan akses pemasaran produk,” jelas Sinaga.

DPD RI juga menekankan pentingnya dukungan anggaran yang memadai untuk memajukan peran koperasi dalam perekonomian dan pembangunan nasional. Lembaga yang menaungi sektor ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), perlu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk efektivitasnya.

Selanjutnya, DPD RI menyarankan agar pembentukan koperasi diatur berdasarkan ruang lingkup usaha anggota dari masing-masing koperasi, seperti koperasi peternak untuk peternak, koperasi petani untuk petani, dan seterusnya, agar memudahkan pengembangan koperasi.

DPD RI berharap RUU Perkoperasian segera disahkan menjadi undang-undang dengan mengakomodir pandangan dan pendapat mereka. Termasuk mengintegrasikan aspek-aspek dari RUU Perkoperasian

yang pernah disampaikan sebagai RUU inisiatif DPD RI pada tahun 2015, khususnya terkait Bab tentang Pendidikan Perkoperasian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa UU yang baru ini mampu mencerminkan kebutuhan dan dinamika perkoperasian yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan prinsip gotong-royong.

(*)



Wakil Ketua Komite IV DPD RI Fernando Sinaga.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Pengrajin Tahu di Limbah yang Buntu



Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang, Jawa Timur HM Syarif Hidayatullah (dua dari kanan) menyampaikan aspirasi Paguyuban Pengrajin Tahu Jombang kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam sebuah pertemuan di Jawa Timur. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pengrajin tahu di Jombang, Jawa Timur, yang tergabung dalam Paguyuban Pengrajin Tahu Jombang, telah menyampaikan kegelisahan mereka kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, akhir Desember lalu di Jombang. Hati dan jiwa mereka terpaut pada masalah pengelolaan limbah produksi, sebuah tantangan yang telah lama mereka genggam tanpa solusi. Mereka berharap, dengan suara mereka yang kini terangkat, solusi akan menyinari jalan mereka.

Di Jombang, para pengrajin tahu masih bertarung dengan dilema pengolahan limbah. Mereka, yang kini berjumlah 87 jiwa, merindukan hari-hari dimana usaha mereka berjalan lancar, terbebas dari kekangan limbah yang dihasilkan dari pengolahan 100 ton kedelai setiap bulannya. Namun, harapan itu masih jauh, terhalang

oleh keterbatasan solusi.

HM Syarif Hidayatullah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang yang dikenal sebagai Gus Sentot, menjadi jembatan aspirasi mereka dengan Ketua DPD RI. Ia mengutarakan, bahwa paguyuban siap menyediakan lahan untuk pengolahan limbah, namun terkendala oleh kebutuhan biaya yang besar. Maka, bantuan dari pemerintah pusat menjadi harapan yang dipanjatkan, sebuah harapan yang mereka percayakan pada LaNyalla untuk diperjuangkan.

“Masalah limbah ini, telah menjadi duri dalam daging bagi para pengrajin tahu di Jombang. Mereka, yang seharusnya tenggelam dalam ketenangan berusaha, justru sering terjatuh dalam pusaran hukum karena limbah yang belum terkelola dengan baik,” kata Gus Sentot, sembari menambahkan, mereka berharap, dengan fasilitasi yang tepat,

dapat menjalankan usaha dengan hati yang lebih tenang, terhindar dari jerat hukum. Selain limbah, masalah lain yang menghantui mereka adalah pasokan kedelai yang akhir-akhir ini terhambat.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjanjikan tindakan cepat. Ia menugaskan Komite I dan II di DPD RI untuk menuntaskan masalah ini dengan menegaskan perlunya perhatian khusus terhadap industri tahu di Jombang yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). LaNyalla juga mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Kabupaten Jombang dan Jawa Timur untuk ambil bagian dalam penyelesaian masalah ini, membantu pengrajin agar mereka terhindar dari problem hukum dan mendapatkan panduan yang lebih baik dalam mengelola usaha serta limbah mereka. (*)



Banjir Penghargaan di Akhir 2023

Di penghujung tahun 2023, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meraih berbagai penghargaan prestisius, mengukuhkan dedikasi dan keberhasilannya di berbagai bidang. Bulan Desember 2023 menjadi saksi atas pengakuan yang luar biasa ini, dimana Setjen DPD RI menerima tiga penghargaan bergengsi: dua dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan satu dari Komisi Informasi Pusat. Tak hanya itu, di bulan November, mereka juga menerima penghargaan Reksa Bandha dari Kementerian Keuangan.

Dua penghargaan dari KASN, yaitu Predikat Sistem Merit kategori “sangat baik”, dan kategori Predikat Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) “baik”, merupakan pengakuan atas upaya Setjen

DPD RI dalam menerapkan sistem merit secara efektif dan profesional. Penghargaan ini diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi, di Yogyakarta. Rahman Hadi, bersama Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian (OKK) Setjen DPD RI Fitriani, mengungkapkan rasa syukur mereka atas pencapaian ini.

Rahman Hadi menyatakan bahwa pencapaian ini adalah buah dari komitmen Setjen DPD RI dalam membangun manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih profesional, dengan menempatkan pegawai pada posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka. “Hal ini telah berkontribusi pada terobosan dan kebijakan yang tepat sasaran, menguatkan kebijakan dan kelem-



Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir bersama Kepala Biro PHM Setjen DPD RI Mahyu Darma, dan Kabag Humas dan Fasilitasi Pengaduan Biro PHM Taufik Jatmiko. (Foro Biro PHM Setjen DPD RI)

bagaan manajemen ASN berbasis sistem merit, yang penting untuk mendorong kinerja dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” kata Rahman.

Penghargaan di bidang informasi publik diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) kepada Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. DPD RI berhasil meraih peringkat pertama dalam kategori “menuju informatif” dari hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2023. Penghargaan ini mencerminkan komitmen tinggi DPD RI dalam menjalankan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, serta menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan.

Lalu Niqman Zahir menyampaikan rasa syukurnya atas tren kenaikan yang dialami setiap tahun dalam penilaian Monev KIP. Sedangkan Kepala Biro Protokol, Humas dan Media (PHM) Setjen DPD RI Mahyu Darma, menegaskan komitmen mereka dalam memberikan pelayanan informasi yang akuntabel dan mudah diakses, dengan menerapkan prinsip kolaborasi, inovasi, dan inklusivitas.

Hasil dari Monev KIP Tahun 2023 memberikan nilai 88,09 kepada DPD RI, menempatkannya di peringkat pertama dari 13 kementerian/lembaga dalam klasifikasi menuju informatif. Sebanyak 369 badan publik mengikuti rangkaian Monev KIP 2023 ini yang meliputi berbagai tahapan evaluasi. (*)

DPD RI Tandatangan Perjanjian Kinerja 2024



Sekjen DPD RI Rahman Hadi bersama Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir dan Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin, ikut menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2024. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Memasuki tahun 2024, pejabat di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi, menandatangani Perjanjian Kinerja untuk tahun tersebut. Acara penandatanganan ini, yang berlangsung pada pertengahan Desember 2023, juga melibatkan Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir dan Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin. Perjanjian ini diharapkan menjadi a c u a n

penting dalam pelaksanaan tugas-tugas Setjen DPD RI sebagai sistem pendukung administrasi dan keahlian bagi DPD RI.

Rahman Hadi mengungkapkan, Perjanjian Kinerja ini bertujuan untuk mendorong unit kerja dalam menggunakan sumber daya dan anggaran secara optimal untuk mencapai kinerja yang berdampak bagi kemajuan lembaga DPD RI, pemerintah, dan masyarakat. Ia berharap, dengan adanya komitmen ini, Setjen DPD RI dapat mencapai target kinerja yang dijanjikan dengan cara yang akunta-



Para pejabat di lingkungan Setjen DPD RI usai menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2024. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

bel, transparan, dan penuh integritas.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini juga merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan PermenPAN-RB No. 53/2014. Dokumen ini berisi penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawah kendalinya, termasuk sasaran, indikator, target, dan anggaran yang terintegrasi dalam pelaksanaan dan pertang-

gungjawaban.

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini akan dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui aplikasi e-SAKIP Reviu. Dokumen ini juga diunggah ke website dpd.go.id, website rb.dpd.go.id, dan aplikasi e-kinerja Setjen DPD RI. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik, termasuk melalui media sosial biro/pusat dan kantor daerah. (*)

ISU KRUSIAL MASA DEPAN PERTANIAN INDONESIA

Oleh:

Nanda Puspita

(Analisis Legislatif Ahli Muda – Pusat Kajian Daerah dan Anggaran)



Tiga pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden Indonesia telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta kontestasi politik dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Ketiganya memiliki visi misi masing-masing untuk mendukung perwujudan RPJMN 2025-2045 dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Salah satu isu strategis yang perlu menjadi pokok diskusi dalam adu gagasan antar paslon ialah persoalan aktual bidang pertanian.

Selama ini pembahasan bidang pertanian lebih sering dititikberatkan pada produktivitas pertanian dan kecukupan pangan yang sering diperbincangkan dalam bingkai ketahanan dan kedaulatan pangan. Di sisi lain, persoalan kesejahteraan petani (sebagai pelaku utama pertanian) dan isu alih fungsi lahan pertanian pangan (sebagai sumber daya pokok pertanian) masih minim pembahasan. Padahal keduanya dipandang sebagai tonggak penyelamat pertanian dalam menghadapi ancaman dan tantangan krisis pangan

global.

Kesejahteraan petani

Pemerintah meyakini bahwa barometer kesejahteraan petani diukur menggunakan indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Menurut Kementerian Pertanian, NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (IT) dan indeks harga yang dibayar petani (IB), yang selanjutnya dinyatakan dalam persentase. IT merupakan komponen biaya usaha tani, sementara IB adalah biaya usaha tani ditambah biaya konsumsi rumah tangga. Semakin tinggi persentase NTP mencerminkan bahwa petani mampu mengatur daya konsumsi rumah tangga, bukan menggambarkan seberapa tinggi tingkat kesejahteraan petani. Dengan kata lain, NTP dapat dijadikan indikator ketahanan standar hidup petani, namun bukan sebagai tolak ukur kesejahteraan petani itu sendiri. NTP hanya mengukur harga tanpa mempertimbangkan penghasilan yang diterima para petani berdasarkan hasil panen dari luasan lahan garapan.

Penentuan indikator kesejahteraan petani ini berbeda dengan skema penetapan upah minimum provinsi (UMP)



dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Penetapan UMP dan UMK ditujukan untuk mencapai taraf hidup yang layak bagi para tenaga kerja, ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal di antaranya kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan inflasi. Atau dengan kata lain, penetapan UMP dan UMK lebih menggunakan pendekatan konsumsi rata-rata per kapita, rata-rata jumlah anggota rumah tangga, dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Dengan demikian, ke depan pengukuran kesejahteraan petani diharapkan dapat lebih disempurnakan menggunakan pendekatan standar hidup masyarakat berkecukupan.

Alih Fungsi Lahan Pertanian

Lahan pertanian sebagai sumber daya pokok sektor pertanian merupakan faktor kunci untuk mencapai kedaulatan pangan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan perekonomian, ancaman peralihan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian semakin masif. Kemajuan zaman memicu pertumbuhan sektor pemukiman, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, infrastruktur pendidikan dan lainnya. Data analisis Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Kementerian ATR/BPN tahun 2019, rata-rata konversi lahan sawah menjadi non-sawah mencapai 100.000 hektar per

tahun. Sementara itu, rata-rata kemampuan mencetak sawah hanya 60.000 hektar setahun. Sehingga terjadi selisih alih fungsi lahan sawah sekitar 40.000 hektar per tahunnya.

Jika mandat peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan dan aturan turunannya pun telah diimplementasikan secara efektif maka berdasarkan regulasi yang ada, alih fungsi lahan seharusnya tidak mempengaruhi tata guna lahan pertanian. Pasal 124 UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja mengamanatkan penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan. UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) mengamanatkan penetapan LP2B dalam Perda RTRW maupun RDTR berdasarkan peta data spasial. Peta data spasial menjadi sangat penting karena ketiadaan data spasial dapat berdampak pada potensi kemunculan perijinan alih fungsi lahan diatas lahan LP2B. Di dalam praktiknya ditemukan masih ada daerah yang belum melaksanakan amanat tersebut.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan semakin tingginya kebutuhan akan ruang, pemerintah diharapkan memberikan perhatian serius pada persoalan alih fungsi lahan pertanian. Salah satu langkah pengendalian alih fungsi lahan untuk percepatan penetapan LP2B maka perumusan

skema pemberian insentif kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan LP2B dalam Perda RDTR dan kepada para petani yang lahannya masuk dalam kategori LP2B perlu segera dilaksanakan sebagai mandat UU PLP2B.

Penutup

Menyelamatkan pertanian tidak hanya semata-mata menerjemahkan dinamika pertanian kedalam laporan resmi berupa angka-angka seperti produktivitas, produksi, luas panen, luas baku sawah dan NTP. Lebih dari itu kesuksesan penanganan persoalan kesejahteraan profesi petani dan isu pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi kunci untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia. DPD RI terutama Komite II melalui fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU yang berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya perlu mendorong program peningkatan kesejahteraan petani serta mengawal regulasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berjalan efektif. Selain itu, pemimpin di Indonesia mendatang diharapkan (1) lebih inovatif dan kreatif dalam menangani persoalan pertanian secara menyeluruh dari hulu hingga hilir (2) mampu melahirkan kebijakan konkret di sektor pertanian yang lebih berpihak pada para petani berdasarkan pengkajian yang komprehensif atas data statistik pertanian. (*)

Empat Kuliner Paling Digemari dari Sumatera Selatan

1 Pempek:



Pempek Palembang (Foto: Female)

Pempek adalah makanan khas Sumatera Selatan yang terbuat dari ikan dan tepung sago. Biasanya disajikan dengan kuah cuka yang manis dan pedas. Pempek memiliki berbagai bentuk dan varian, seperti pempek kapal selam yang berisi telur, pempek lenjer, dan lain-lain.

2 Model:



Model, masakan khas Palembang. (Foto: Enimekspres)

Model adalah jenis sup yang mirip dengan pempek, tapi disajikan dalam bentuk sup dengan kuah yang kaya rasa. Biasanya mengandung pempek dan bihun, serta disajikan dengan kuah yang sama seperti pempek.

3 Tekwan:



Tekwan. (Foto: Fimela)

Tekwan adalah sup ikan yang ringan, terbuat dari bola-bola ikan yang mirip dengan pempek, disajikan dengan kuah bening yang beraroma dan bihun. Tekwan sering dihiasi dengan jamur, bawang goreng, dan seledri.

4 Martabak HAR:



Martabak HAR. (Foto: Detikcom)

Martabak HAR adalah varian martabak manis yang khas dari Sumatera Selatan. Martabak ini terkenal dengan teksturnya yang lembut dan topping yang beragam seperti cokelat, keju, dan kacang.



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan

Selamat
**Hari Dharma
Samudera**

15 Januari 2024



MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

